

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN TENAGA KERJA  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
(Studi Pada Kota Medan Tahun 2012-2016)**

**Evalina Pakpahan,SE.,M.Si**

*Fakultas Ekonomi  
Universitas Tjut Nyak Dhien*

**Abstract**

*This research aims to test the effect of capital expenditure and labor to economic growth on Medan City from 2012 – 2016. This study used time series and the analysis technique used multiple linier regression analysis model with ordinary least square method (OLS). The results show that capital expenditure and labor have positive effect but it is not significant to economic growth on Medan City.*

*Keywords: capital expenditure, labor, economic growth*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan selama kurun waktu 2012-2016. Data yang digunakan adalah data time series dan teknik analisis menggunakan model regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan.

Kata Kunci : belanja modal, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi

**PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang

dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi perlu juga diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Sukirno S., 2011). Sejatinnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja.

Adanya perbedaan-perbedaan di antara sifat-sifat dari perekonomian daerah dengan perekonomian nasional dan diantara kekuasaan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan akan menimbulkan pengaruh yang berbeda pula terhadap corak strategi program pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah (APBD dan APBN) dan bersumber dari masyarakat. Perbedaan sifat perekonomian daerah mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk memiliki perencanaan pembangunan sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai.

Lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan landasan bagi implementasi desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah memiliki kewenangan fiskal dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam tataran praktik, desentralisasi fiskal telah dimaknai dengan beragam oleh birokrat dan politisi lokal. Perbedaan dalam memaknai konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah mengakibatkan adanya perbedaan implementasi ditingkat lokal. Permasalahan-permasalahan desentralisasi fiskal yang muncul mendorong pemerintah daerah untuk merevisi dan menggantikan kedua UU tersebut di atas dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 yang disinyalir beberapa kalangan sebagai UU resentralisasi. Sejak desentralisasi fiskal di Indonesia, kemampuan anggaran daerah semakin besar, namun jika tidak dikelola dengan baik justru akan menciptakan ketidakefisienan dan pemborosan terhadap dana publik tersebut (Sun'an, M. dan Senuk, A., 2015).

Bagi negara berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang baik guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi dimana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha berkelanjutan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah.

**Tabel 1**  
**PDRB Kota Atas Dasar Harga Konstan (Jutaan Rupiah) Kota Medan**  
**Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b>	<b>PDRB (%)</b>
2012	105.162,00	7,66
2013	110.795,42	5,36
2014	117.528,08	6,08
2015	124.277,48	5,74
2016	132.062,86	6,27

Sumber: BPS Kota Medan dalam Angka 2013-2017

Tabel 1 dapat dilihat gambaran kondisi perekonomian yang fluktuatif ditunjukkan dari nilai PDRB Kota Medan tahun 2012 meningkat sebesar 7,66%. Akan tetapi tahun 2013 pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan sebesar 5,36%. Mengalami peningkatan tahun 2014 sebesar 6,08%, menurun tahun 2015 sebesar 5,74% dan kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 6,27%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau negara adalah akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah, peralatan fiskal, dan sumber daya manusia disamping pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin banyak faktor produksi tenaga kerja sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.

Alokasi belanja modal dibuat sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah yang bersangkutan. Kebijakan belanja modal menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi perkembangan belanja modal dan Tenaga Kerja di Kota Medan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2.**  
**Perkembangan Realisasi Belanja Modal dan Tenaga Kerja**  
**Kota Medan Tahun 2012 – 2016**

Tahun	Belanja Modal (Ribu Rupiah)	Tenaga Kerja (Orang)
2012	558.428.738.000	1.483.840
2013	630.802.959.000	1.492.916
2014	783.883.178.000	1.530.011
2015	963.850.090.000	1.517.359
2016	936.599.133.000	1.562.149

Sumber: Kota Medan dalam Angka, 2012 – 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai realisasi belanja modal periode tahun 2012-2016 selalu positif. Tahun 2012 sebesar Rp 558.428.738.000 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 mencapai Rp 936.599.133.000. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah umur 15-64 tahun, penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Tenaga kerja yang tersedia di Kota Medan menunjukkan tren positif yaitu tahun 2012 sebanyak 1.483.840 jiwa terus meningkat sampai tahun 2016 sebanyak 1.562.149 jiwa.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji pengaruh realisasi belanja modal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan pada tahun 2012-2016.

Hasil penelitian Priambodo, A., 2015 dengan menggunakan data 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2012 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD, belanja modal dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **PERTUMBUHAN EKONOMI**

Perencanaan pembangunan daerah bukan perencanaan dari suatu daerah melainkan perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara

bertanggung jawab. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu dengan yang lain. Lebih lanjut, perencanaan pembangunan diperlukan karena tiga faktor, antara lain (1) adanya kegagalan mekanisme pasar (*market failures*), (2) ketidakpastian masa datang, dan (3) untuk memberikan arah pembangunan yang jelas.

Perencanaan ekonomi adalah upaya pemerintah yang dilakukan secara sengaja dan hati-hati untuk mengoordinasikan keputusan-keputusan ekonomi tersebut ditujukan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus bahkan untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi utama (pendapatan, konsumsi, kesempatan kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain-lain) yang tujuannya akhirnya adalah terpenuhinya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya (Kuncoro, M., 2012).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan. Ada dua kelompok faktor produksi yang sangat menentukan pertumbuhan yaitu faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi; dan faktor non ekonomi seperti keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, etos kerja dan disiplin pekerja yang tinggi (Tambunan, 2011). Ketersediaan faktor produksi tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi yang diharapkan.

Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Paradigma pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk kelestarian lingkungan dan kebijakan yang tepat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan secara sosial (Xue, 2012).

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian (Mankiw, N.G., 2007). PDRB digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, menurut P. Eko Prasetyo (2009) pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu misalnya satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.

## **BELANJA MODAL**

Menurut PP Nomor 24 tahun 2005, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan.

Belanja modal menurut Halim dan Kusufi (2012) merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 113/PMK/2010. Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Alokasi DPIPDA untuk kabupaten/kota digunakan untuk: 1) pemeliharaan berkala, peningkatan, dan pembangunan jalan/jembatan, 2) pemeliharaan berkala, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi, 3) penyempurnaan, pembangunan, pengembangan, dan perluasan jaringan sistem air minum, persampahan, limbah dan drainase, 4) infrastruktur pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit, 5) menunjang penyediaan prasarana pelabuhan daerah, 6) penyediaan prasarana sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan 7) penyediaan prasarana pemerintah daerah.

## **TENAGA KERJA**

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja lebih besar berarti menambah jumlah tenaga kerja produktif sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar (Todaro, 2006).

Para pengikut Keynes tidak melihat tambahan penduduk sekedar sebagai tambahan penduduk saja, tetapi juga melihat adanya suatu kenaikan daya beli (*purchasing power*). Para pengikut Keynes juga menganggap adanya kemajuan dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja ini akan selalu mengiringi kenaikan jumlah penduduk.

Bagi negara-negara berkembang keadaannya justru terbalik sama sekali, yaitu bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat justru menghambat perkembangan ekonomi. Kaum klasik seperti Adam Smith Ricardo dan Robert Malthus berpendapat bahwa selalu akan saling berkejaran antara pertumbuhan

output dengan pertumbuhan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja maka paling tidak akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau penduduk tersebut mendapat pekerjaan, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Tetapi kalau tidak mendapat pekerjaan berarti mereka akan menganggur dan justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah (Subandi, 2011).

## METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Data yang diperoleh adalah realisasi belanja modal, jumlah angkatan kerja dan PDRB Kota Medan.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Alasan pemilihan model analisis ini karena penaksiran OLS merupakan penaksiran tak bias yang terbaik (*Best Linier Unbiased Estimator/BLUE*). Untuk memudahkan dalam pengolahan data maka sebagai alat analisis yang digunakan dalam mengolah data tersebut menggunakan software SPSS versi 18.0. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	=	Pertumbuhan ekonomi (PDRB)
X <sub>1</sub>	=	Belanja Modal
X <sub>2</sub>	=	Tenaga kerja
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta_1$ dan $\beta_2$	=	Koefisien regresi
$\varepsilon$	=	Error terms

Sebelum analisis data dan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari Uji asumsi Autokorelasi, Multikolinearitas, dan Heteroskedastisitas. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini di log-kan terlebih dahulu. Penggunaan logaritma dilakukan untuk mempermudah dalam penyelesaian analisa dan hasil analisa akan lebih bermakna.

### a. Uji t-Statistik

Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan  $\alpha < 0,05$  dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan  $\alpha > 0,05$ .

1. Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Atau

1. Jika  $p < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Jika  $p > 0,05$ ,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### **b. Uji F-Statistik**

Signifikansi model regresi secara simultan diuji dengan melihat nilai signifikansi (sig) dimana jika nilai sig dibawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F-statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Kriteria:

1. Jika  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
  2. Jika  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- Atau
1. Jika  $p < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
  2. Jika  $p > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

### **c. Koefisien Determinasi R-Square**

Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai  $R^2$  menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Nilai Koefisien Determinasi adalah antara nol sampai 1. Semakin tinggi nilai  $R^2$  maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Persyaratan Analisis**

#### **a. Autokorelasi**

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model penelitian ini dilakukan melalui uji run test dengan nilai asymp. Sig (2-taild) sebesar 0,913 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu

model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat.

Selain itu uji ini juga menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan antara 1 – 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas adalah sebesar 3,140 artinya tidak terjadi multikolinearitas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya *varianceresidual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat melalui hasil uji t statistik yang dapat menjamin keakuratan hasil. Dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser.

Analisis dilakukan dengan melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen (probabilitas signifikansi di atas kepercayaan 5%) maka indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas adalah tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model penduga dimana tidak ada nilai t-hitung atau nilai signifikan ( $\text{sig.} < 0,05$ ).

## UJI HIPOTESIS

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda melalui perhitungan komputer dengan program SPSS, maka diperoleh persamaan regresi  $Y = -9,187 + 0,228X_1 + 1,869X_2$ . Persamaan ini mengandung makna tanpa belanja modal dan tenaga kerja sebesar satu satuan ceteris paribus maka pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 9.187 satuan.

### Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi variabel belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Nilai koefisien regresi menunjukkan tanda positif yaitu sebesar 0,228 dan nilai  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  ( $2,904 < 2,920$ ), hal ini berarti bahwa jika belanja modal naik 1% maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,228%. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Arini PR., 2016 yang berjudul Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan menunjukkan belanja modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan Masyarakat dan belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja modal untuk penyediaan infrastruktur penunjang ekonomi ternyata belum mampu menunjukkan pengaruh yang berarti bagi

pertumbuhan ekonomi Kota Medan meskipun pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah belanja modal Kota Medan saat ini masih belum menyentuh kebutuhan Kota secara spesifik, dengan kata lain jumlah belanja modal harus dinaikkan dengan komposisi belanja modal dalam bidang peningkatan sarana dan prasarana publik, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, jalan raya dan sarana penunjang lainnya. Belanja modal yang dimaksud haruslah mencakup semua pengeluaran yang sifatnya meningkatkan produktivitas. Salah satu contoh adalah infrastruktur transportasi seperti kualitas jalan raya yang baik disertai moda transportasi yang sehat akan meningkatkan pergerakan barang dan jasa yang lebih cepat dan efisien energi.

### **Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif, nilai koefisien variabel tenaga kerja adalah sebesar 1,869 dan secara statistik tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Sejalan dengan hasil penelitian Priambodo, A., 2015 dengan menggunakan data 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2012 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD, belanja modal dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya diharapkan memiliki kualitas sehingga mampu menghasilkan output yang besar. Pada kenyataannya ketika tenaga kerja siap bersaing baik dari sisi pendidikan dan keterampilan namun kesempatan mendapatkan pekerjaan terbatas karena minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia artinya jumlah pengangguran tidak menurun secara signifikan. Bercermin dari kondisi ini pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas didasarkan kepada pemikiran bahwa bukan sekedar menyiapkan lulusan yang siap masuk dalam pasar kerja namun lebih dari pada itu. Pendidikan juga harus mempersiapkan lulusan yang siap menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

Konsep pembangunan manusia bukan hal yang baru dalam wacana konsep maupun praktik pembangunan. Konsep tersebut muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan model pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan secara merata tidak terwujud. Kesadaran bahwa pembangunan seyogyanya menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan telah melahirkan model pembangunan yang bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia yakni pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar. Namun, dalam praktiknya model pembangunan yang bertumpu pada pemenuhan dasar juga ternyata memiliki kelemahan karena sering kali terjebak pada dominasi peran birokrasi pemerintah sebagai penentu dan pelaksana program. Alih-alih memulihkan martabat manusia, pendekatan *top down* yang dominan dalam model pembangunan *basic needs* justru menciptakan ketergantungan baru masyarakat pada pemerintah.

Modal manusia yang berkualitas akan memastikan kelangsungan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan penduduk dan seterusnya taraf hidup akhirnya menjamin keselamatan sosial masyarakat, meningkatkan tahap kesehatan, keharmonisan serta kesejahteraan yang berkelanjutan yang akan dapat melangsungkan pertumbuhan ekonomi. Kondisi modal manusia di negara miskin dan berkembang semakin parah dengan adanya pengaruh globalisasi ekonomi yang tidak terkendali. Hal ini disebabkan karena peluang globalisasi ekonomi hanya bisa ditangkap oleh mereka yang memiliki kemampuan dan *knowledge* yang baik.

Model pembangunan manusia perlu diredesain dengan berbasis pada investasi sosial untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki kemandirian untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Kebijakan investasis sosial yang perlu dikembangkan memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang umumnya diterapkan pada model pembangunan *basic needs*. Kebijakan investasi sosial yang dimaksud lebih dari sekedar pemenuhan pelayanan dasar tapi juga diorientasikan pada pemulihan kepercayaan diri masyarakat sehingga mampu memberdayakan dirinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi (Sun'an, 2015).

Berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai sig. F sebesar 0,028, hasil ini menunjukkan nilai sig < 0,05. Artinya belanja modal, tenaga kerja secara simultan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya oleh Putri P.I., (2014) bahwa investasi, belanja modal, tenaga kerja dan infrastruktur berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

## KESIMPULAN

Variabel belanja modal dan tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara bersama-sama belanja modal dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan periode tahun 2012 – 2016.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan Belanja Modal yang lebih banyak diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Peranan belanja modal sangat penting sehingga dapat dikatakan sebagai penentu keberhasilan tujuan pembangunan ekonomi yang ditargetkan.

Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja maka dibutuhkan tenaga kerja berkualitas hal ini dapat dilakukan melalui alokasi anggaran pendidikan. Pemerintah juga ikut dalam merancang kurikulum yang bersifat kompetensi sehingga lulusan sekolah menengah atas sederajat maupun lulusan perguruan tinggi tidak hanya siap bersaing di pasar tenaga kerja namun juga siap membuka lapangan kerja berkualitas.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anini, PR., 2016. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *Jurnal EkonomiSTIE YKPN YOGYAKARTA* Volume 2.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro; Semarang.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro; Semarang.
- Halim, A. dan Kusufi S., 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Kuncoro, M., (2012). *Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N.Gregory., 2007. *Teori Makro Ekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Murni, Asfia, 2016. *Ekonomi Makro Edisi Revisi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Priambodo, Agung., 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Economics Development Analysis Journal* 4 (1)hal 1 – 9.
- Putri, P.I., 2014. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa. *Journal of Economics and Policy* 7 (2).
- Suband, 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Alfabeta : Bandung.
- Sun'an, M. dan Senuk, A., (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta; Mitra Wacana Media.
- Todaro, 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.
- Xue, J., 2012. Potentials for Decoupling Housing Related Environmental Impacts from Economic Growth. *Environmental Development*, p. 18-35.